JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal.2193-2200, ISSN: 3089-0128 (Online)

Dinamika Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Distribusi Bantuan Pangan di Desa Bantargebang

Selviana[1], Ruslin[2]
[1]*Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia*
[2]*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia*
e-mail: anaselvi101116@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 02, 2026
Revised November 11, 2026
Accepted November 18, 2026

Keywords:
Social Action Theory; Village Government; Communication Dynamics; Food Aid; Bantargebang

ABSTRACT

Food aid is a government program whose success depends on clear communication between the village government and the community, particularly regarding the mechanism for determining recipients. This study aims to describe the dynamics of communication within the Bantargebang Village Government in explaining the distribution of food aid using Max Weber's theory of social action, which includes instrumental rational action, value-rational action, affective action, and traditional action. Methodology: This is a descriptive qualitative study using a case study approach, drawing on the author's firsthand experience as both a village official and a distribution officer, interviews with the village secretary, and a review of the literature. The results indicate that residents who did not receive assistance initially suspected that the village government had altered the recipient data. These suspicions constituted affective action triggered by disappointment, whereas the village officials' explanation that the data came from the Social Services Office and was collected by PKH facilitators represented instrumental rational and value-rational action. Face-to-face communication, which is customary in the village, helped residents understand and accept these explanations. This article recommends consistent information dissemination, clarification of the limits of the village's authority, and the provision of opportunities for residents to seek clarification.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received November 02, 2026
Revised November 11, 2026
Accepted November 18, 2026

Kata kunci:
Teori Tindakan Sosial; Pemerintah Desa; Dinamika Komunikasi; Bantuan Pangan; Bantargebang

ABSTRAK

Bantuan pangan merupakan program pemerintah yang keberhasilannya bergantung pada komunikasi yang jelas antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama mengenai mekanisme penetapan penerima. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika komunikasi Pemerintah Desa Bantargebang dalam menjelaskan distribusi bantuan pangan dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang meliputi tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui pengalaman langsung penulis sebagai perangkat desa sekaligus petugas penyaluran, wawancara dengan sekretaris desa, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang tidak menerima bantuan sempat menduga data penerima diubah oleh pemerintah desa. Dugaan tersebut merupakan tindakan afektif yang dipicu kekecewaan, sedangkan penjelasan perangkat desa bahwa data berasal dari Dinas Sosial dan pendataan pendamping PKH merupakan tindakan rasional instrumental dan rasional nilai. Komunikasi tatap muka yang telah menjadi kebiasaan di desa membantu warga memahami dan menerima

penjelasan tersebut. Artikel ini menyarankan penyampaian informasi yang konsisten, penjelasan batas kewenangan desa, dan penyediaan ruang klarifikasi bagi warga.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Selviana
Universitas Terbuka
e-mail: *anaselvi101116@gmail.com*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu dengan tujuan membentuk pemahaman bersama. Naim (2017) menjelaskan bahwa komunikasi tidak sekadar pengiriman informasi, melainkan proses interaksi yang memungkinkan kedua pihak saling memberi tanggapan sehingga makna pesan dapat dipahami secara sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial, kepercayaan, dan kerja sama, termasuk hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Penelitian ini membahas dinamika komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam distribusi Bantuan Pangan di Desa Bantargebang. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan pangan masih menghadapi permasalahan komunikasi, terutama terkait informasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fenomena yang terjadi di Pemerintah Desa Bantargebang, *Hujaimah (48)*, seorang warga Desa Bantargebang yang tidak masuk dalam data nominasi penerima bantuan pangan mendatangi kantor Desa menemui Kaur TU Umum (Ahmad Fauzi, 29), dalam hal ini sebagai Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial). Hujaimah menyampaikan dalam pemahaman nya bahwa Keluarga Penerima Manfa'at (KPM) menduga adanya perubahan data oleh pemerintah desa. "*Saya tuh tinggal di Bantargebang sudah 15tahun saya tidak pernah menerima bantuan masa tetangga saya selalu dapet bantuan sedangkan tetangga saya terlihat lebih mampu dari saya, kenapa saya sendiri enggak? Plis atuh pak daftarkan nama saya bapak kan bisa masukkan nama saya ke daftar penerima bantuan, bisa kan?i",* ujarnya. Beliau menyampaikan dengan perasaan marah dan sedih. Dalam kondisi tersebut kaur TU Umum *(Ahmad Fauzi, S. Sos*) kemudian memberikan penjelasan. *"Ibu, data bantuan yang kami terima, semuanya itu dari dinas sosial berbentuk data nominasi, nah termasuk untuk Data Bantuan Pangan ini sejumlah 872 penerima yang memenuhi kriteria, data yang keluar itu berdasarkan Desil, barangkali ibu Desilnya tinggi, sebentar saya cek ya data Ibu, Hmmm…..disini ibu Halimah desilnya 7 bu, makanya ibu gak masuk ke daftar penerima bantuan pangan. Sekarang saya bantu ibu untuk penurunan desilnya ya, paling cepat setelah 3 bulan ibu bisa cek lagi kesini, mudah-mudahan desilnya bisa turun sesuai dengan keadaan ibu hujaima yang sebenarnya".* Dari fenomena tersebut mendeskripsikan bagaimana metode komunikasi organisasi dapat menjadikan *problem solving* dari berbagai bentuk permasalahan di intansi pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi berlangsung di dalam organisasi, antarkelompok, dan dalam struktur birokrasi. Pemerintah desa merupakan organisasi birokrasi paling dekat dengan warga, sehingga setiap tindakan komunikasi perangkat desa memiliki makna sosial bagi masyarakat. Max Weber memandang tindakan sosial sebagai tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain (Ritzer, 2012). Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat indikator, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Keempat indikator tersebut relevan untuk membaca bagaimana perangkat desa dan warga bertindak serta merespons dalam proses komunikasi bantuan pangan, karena setiap pihak memiliki alasan, nilai, dan emosi yang berbeda ketika berinteraksi.

Kajian teori tindakan sosial Weber berkaitan erat dengan penelitian ini. Penjelasan perangkat desa mengenai asal data dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental karena dilakukan dengan cara yang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan, yaitu meluruskan kesalahpahaman. Kesediaan perangkat desa untuk tetap berpegang pada data resmi mencerminkan tindakan rasional nilai, yakni kepatuhan terhadap kejujuran dan aturan. Kedatangan warga yang membawa kekecewaan menggambarkan tindakan afektif, sedangkan kebiasaan warga datang langsung ke kantor desa untuk bertanya merupakan bentuk tindakan tradisional. Sedarmayanti (2018) menegaskan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan bagian dari hubungan pemerintah dengan masyarakat, sementara Abdullah et al. (2026) menekankan pentingnya menyesuaikan pesan dan saluran komunikasi dengan karakteristik khalayak.

Sejumlah penelitian terdahulu relevan dengan persoalan ini. Retpitasari et al. (2024) membahas komunikasi publik Pemerintah Kecamatan Prambon dalam penyaluran bantuan sosial pangan non-tunai, Sa'adah dan Priyanti (2024) menelaah strategi komunikasi pemerintah dalam sosialisasi BPNT di Desa Simpangan. Gusrienti (2025) menyoroti keterkaitan transparansi dan komunikasi dalam pencairan bantuan sosial. Lanonci et al. (2025) membahas peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, sedangkan Yunitasari dan Anshori (2025) menekankan komunikasi partisipatif dalam ketahanan pangan. Di sisi lain, teori tindakan Weber telah digunakan oleh Fikria dan Moefad (2024) untuk menganalisis pengenalan tradisi lokal kemasyarakatan serta oleh Yusra dan Hanani (2024) untuk membaca tindakan warga sekolah. Perbedaannya, penelitian terdahulu tentang bantuan sosial umumnya berfokus pada strategi sosialisasi dari sisi pemerintah dan belum membaca interaksi pemerintah desa dengan warga melalui indikator tindakan sosial Weber, sedangkan penelitian tentang Weber belum menyentuh komunikasi distribusi bantuan pangan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada penggunaan empat indikator tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis satu peristiwa komunikasi klarifikasi antara perangkat desa dan warga dalam distribusi bantuan pangan, berdasarkan pengalaman langsung penulis sebagai pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memaparkan strategi komunikasi, tetapi juga menjelaskan makna di balik tindakan setiap pihak.

Judul "Dinamika Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Distribusi Bantuan Pangan di Desa Bantargebang" dipilih karena distribusi bantuan pangan merupakan program yang sangat dekat dengan kebutuhan warga dan rawan menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, posisi penulis sebagai perangkat desa sekaligus petugas penyaluran memberi akses langsung terhadap peristiwa komunikasi yang terjadi, sehingga dinamika interaksi dapat digambarkan secara nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana dinamika komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam distribusi bantuan pangan di Desa Bantargebang ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber. Fokus tersebut dirinci menjadi dua pertanyaan, yaitu (1) bagaimana dinamika komunikasi antara Pemerintah Desa Bantargebang dan warga berlangsung ketika seorang warga mempertanyakan data penerima bantuan pangan; dan (2) bagaimana penjelasan serta respons dalam interaksi tersebut membantu mengklarifikasi kesalahpahaman. Tujuannya adalah mendeskripsikan tahapan interaksi dalam peristiwa tersebut berdasarkan indikator tindakan sosial Weber dan mengidentifikasi pelajaran untuk memperjelas informasi bantuan pangan.

LANDASAN TEORI

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial secara interpretatif. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan atau dipengaruhi oleh tindakan orang lain (Ritzer, 2012). Artinya, tindakan seseorang tidak dapat dipahami hanya dari perilaku yang tampak, tetapi juga dari alasan dan makna yang melatarbelakanginya. Fikria dan Moefad (2024) menjelaskan bahwa pendekatan Weber menempatkan individu sebagai aktor yang aktif menafsirkan situasi sosial di sekitarnya, sehingga tindakan yang sama dapat memiliki makna berbeda bagi pelaku yang berbeda.

Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat indikator. Pertama, tindakan rasional instrumental (zweckrational), yaitu tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan tujuan dan cara yang paling efektif untuk mencapainya. Kedua, tindakan rasional nilai (wertrational), yaitu tindakan

yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai tertentu seperti kejujuran, keadilan, atau kepatuhan pada aturan, tanpa terlalu memperhitungkan untung dan rugi. Ketiga, tindakan afektif, yaitu tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan, seperti kecewa, marah, atau senang, yang muncul secara spontan. Keempat, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun di lingkungan masyarakat (Ritzer, 2012; Yusra & Hanani, 2024).

Dalam penelitian ini, keempat indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis. Tindakan rasional instrumental dilihat dari cara perangkat desa memilih penjelasan dan saluran komunikasi untuk meluruskan informasi. Tindakan rasional nilai dilihat dari komitmen perangkat desa terhadap data resmi dan aturan penyaluran. Tindakan afektif dilihat dari dugaan dan kekecewaan warga yang tidak menerima bantuan. Tindakan tradisional dilihat dari kebiasaan warga mendatangi kantor desa untuk bertanya secara langsung.

Komunikasi Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan

Komunikasi pemerintah desa merupakan bagian dari komunikasi pemerintahan, yaitu proses penyampaian informasi, kebijakan, dan program dari pemerintah kepada masyarakat serta penerimaan tanggapan dari masyarakat (Sedarmayanti, 2018). Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan warga dan menjadi pelaksana berbagai program dari pemerintah di atasnya, termasuk penyaluran bantuan pangan. Oleh karena itu, perangkat desa sering menjadi tempat pertama warga meminta penjelasan.

Abdullah et al. (2026) menekankan bahwa komunikasi publik yang efektif harus menyesuaikan pesan dan saluran dengan karakteristik khalayak. Dalam penyaluran bantuan, hal ini berarti informasi mengenai kriteria, sumber data, dan jadwal perlu disampaikan dengan bahasa sederhana. Gusrienti (2025) menambahkan bahwa transparansi merupakan syarat agar masyarakat percaya pada proses pencairan bantuan sosial, sementara Megawati dan Kurniati (2022) menyoroti pentingnya pengawasan dalam diseminasi informasi publik agar informasi yang beredar tetap akurat. Komunikasi yang bersifat dua arah dan partisipatif juga diperlukan agar warga memperoleh ruang untuk bertanya dan menyampaikan keberatan (Lanonci et al., 2025; Yunitasari & Anshori, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara utuh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2019). Kasus yang dikaji adalah satu peristiwa komunikasi dalam penyaluran bantuan pangan di Desa Bantargebang, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.

Data diperoleh melalui tiga cara. Pertama, pengalaman langsung penulis sebagai perangkat desa dan petugas penyaluran bantuan pangan yang ditugaskan oleh Dinas Sosial, yang direkonstruksi dalam bentuk catatan peristiwa. Kedua, wawancara dengan sekretaris desa pada 17 Juni 2026 mengenai langkah komunikasi yang dapat dilakukan pemerintah desa. Ketiga, studi pustaka terhadap buku dan artikel jurnal mengenai komunikasi pemerintahan, komunikasi publik, transparansi bantuan sosial, dan teori tindakan sosial Weber. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen utama, sehingga keterlibatan langsung penulis menjadi sumber data yang penting, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan sumber lain.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Peristiwa dipilah menjadi konteks kejadian, dugaan warga, penjelasan perangkat desa, dan respons warga, kemudian setiap tahap dianalisis menggunakan empat indikator tindakan sosial Weber dan dibandingkan dengan literatur. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu peristiwa dan belum melibatkan wawancara dengan warga yang bersangkutan maupun observasi terstruktur, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi kepada seluruh masyarakat Desa Bantargebang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Bantargebang

Desa Bantargebang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan desa saat ini dipimpin oleh Kepala Desa (Bapak H. Dedi Mulyadi) untuk periode (2019-2027), dibantu oleh sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Pemerintah desa menjalankan fungsi pelayanan administrasi dan menjadi pelaksana program dari pemerintah daerah, termasuk penyaluran bantuan pangan yang data penerimanya bersumber dari Dinas Sosial. Penulis merupakan bagian dari perangkat desa tersebut dan ditugaskan sebagai petugas penyaluran.

Mekanisme Data Penerima dan Posisi Pemerintah Desa

Berdasarkan pengalaman penulis, data penerima bantuan pangan yang digunakan dalam penyaluran diterima dari Dinas Sosial dalam bentuk daftar nominatif (danom). Data tersebut berasal dari pendataan pendamping PKH yang diunggah melalui sistem sesuai kriteria yang berlaku. Pemerintah desa menggunakan data tersebut sebagai acuan penyaluran dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah daftar penerima.

Penjelasan mengenai asal data dan batas kewenangan merupakan bagian penting dari komunikasi publik. Ketika warga tidak mengetahui alur pendataan, mereka cenderung mengaitkan keputusan yang tidak sesuai harapan dengan pihak yang paling dekat, yaitu pemerintah desa. Dalam kerangka Weber, kepatuhan perangkat desa untuk tetap menggunakan data resmi merupakan tindakan rasional nilai, karena didasarkan pada nilai kejujuran dan ketaatan terhadap aturan, meskipun berisiko menimbulkan ketidakpuasan sebagian warga.

Dinamika Interaksi Warga dan Perangkat Desa

Peristiwa yang menjadi fokus artikel terjadi ketika seorang warga yang tidak menerima bantuan pangan datang ke kantor desa dan menduga data penerima telah diubah oleh pemerintah desa. Dugaan tersebut lahir dari rasa kecewa karena merasa berhak tetapi tidak terdaftar. Dalam pandangan Weber, sikap ini merupakan tindakan afektif, yaitu tindakan yang dipicu oleh perasaan dan muncul secara spontan sebelum warga memperoleh informasi yang utuh. Di sisi lain, pilihan warga untuk datang langsung ke kantor desa, bukan menyampaikan keluhan melalui media lain, mencerminkan tindakan tradisional karena masyarakat desa terbiasa menyelesaikan persoalan dengan bertatap muka dengan perangkat desa.

Penulis bersama perangkat desa kemudian menjelaskan bahwa data penerima berasal dari Dinas Sosial dan disampaikan kepada desa sebagai acuan penyaluran. Penjelasan ini disusun secara sederhana dan berfokus pada pertanyaan warga, yaitu siapa yang menetapkan data dan apa peran desa. Cara tersebut merupakan tindakan rasional instrumental, karena perangkat desa memilih pesan dan cara penyampaian yang paling efektif untuk mencapai tujuan, yakni meluruskan kesalahpahaman tanpa menimbulkan konflik. Setelah mendapatkan penjelasan, warga tersebut memahami dan menerima penjelasan yang diberikan.

Peristiwa ini sejalan dengan gagasan komunikasi dua arah yang dikemukakan Naim (2017), yaitu komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi memberi kesempatan kepada penerima pesan untuk bertanya dan memperoleh tanggapan. Lanonci et al. (2025) juga menyoroti pentingnya dialog dalam komunikasi pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa keempat tindakan Weber saling berkaitan: tindakan afektif warga dapat diredakan oleh tindakan rasional instrumental dan rasional nilai perangkat desa, melalui saluran komunikasi tradisional yang telah dipercaya masyarakat. Meski demikian, satu peristiwa tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa komunikasi tatap muka selalu menyelesaikan semua keluhan.

Kejelasan, Transparansi, dan Konsistensi Pesan

Penjelasan kepada warga perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan berfokus pada hal yang dipertanyakan. Informasi yang terlalu teknis mengenai sistem pendataan berpotensi sulit dipahami, sehingga petugas perlu menerangkan alur secara ringkas dan memberi kesempatan bertanya. Hal ini sejalan dengan Abdullah et al. (2026) yang menekankan penyesuaian pesan dengan karakteristik khalayak.

Transparansi tidak berarti membuka seluruh data pribadi penerima kepada publik. Pemerintah desa dapat menjelaskan prosedur, pihak yang mengelola data, serta saluran pengaduan tanpa menyebarkan informasi pribadi. Gusrienti (2025) membahas pentingnya transparansi dalam komunikasi bantuan sosial, sedangkan Megawati dan Kurniati (2022) menyoroti pengawasan diseminasi informasi publik. Koordinasi dengan Dinas Sosial juga penting agar informasi yang disampaikan petugas desa sesuai dengan keterangan resmi. Retpitasari et al. (2024) dan Sa'adah dan Priyanti (2024) menunjukkan bahwa informasi program yang jelas dan mudah diakses membantu masyarakat memahami penyaluran bantuan.

Langkah komunikasi yang dapat dilakukan pemerintah desa juga disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Dede Yakub dalam wawancara sebagai berikut.

> *"Dari peristiwa yang dibahas, terdapat beberapa langkah praktis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah desa dapat menyiapkan penjelasan singkat mengenai alur pendataan, asal daftar penerima, dan peran desa dalam penyaluran. Kedua, petugas perlu menggunakan bahasa sehari-hari dan menghindari istilah teknis tanpa penjelasan. Ketiga, kantor desa dapat menyediakan jalur bertanya atau pengaduan yang jelas agar warga mengetahui ke mana harus meminta klarifikasi. Keempat, informasi yang disampaikan oleh petugas perlu konsisten dengan keterangan resmi dari Dinas Sosial atau pihak terkait." (Wawancara dengan Sekretaris Desa Bantargebang, 17 Juni 2026)*

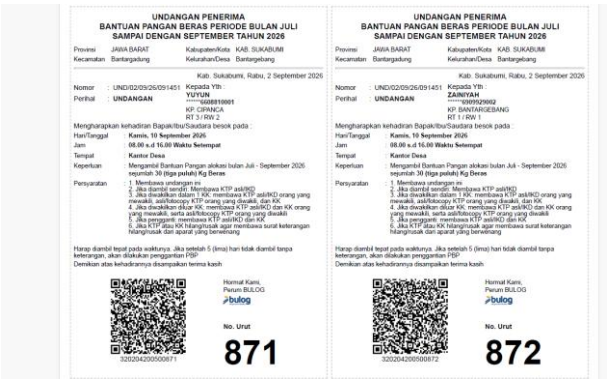
Pernyataan tersebut memperlihatkan tindakan rasional instrumental pada tingkat organisasi, yaitu upaya pemerintah desa merancang cara komunikasi yang efektif agar kesalahpahaman serupa tidak terulang. Pemilihan media juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Pengumuman tertulis atau media digital dapat membantu menyebarkan informasi, tetapi komunikasi langsung tetap penting bagi warga yang terbiasa bertanya secara tatap muka. Sukendro dan Aulia (2025) membahas peluang dan tantangan komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi, sementara Yunitasari dan Anshori (2025) memberi gambaran relevansi komunikasi partisipatif dalam program berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Dinamika komunikasi antara Pemerintah Desa Bantargebang dan masyarakat dalam distribusi bantuan pangan terlihat dari peristiwa ketika seorang warga yang tidak menerima bantuan menduga data penerima telah diubah oleh pemerintah desa. Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, dugaan warga merupakan tindakan afektif, kedatangan langsung ke kantor desa merupakan tindakan tradisional, sedangkan penjelasan perangkat desa mengenai asal data dari Dinas Sosial merupakan tindakan rasional instrumental yang dilandasi tindakan rasional nilai berupa kepatuhan pada data resmi. Setelah mendapat penjelasan langsung, warga tersebut memahami dan menerima penjelasan itu, sehingga komunikasi tatap muka terbukti membantu mengklarifikasi kesalahpahaman pada kasus yang diamati. Kesimpulan ini terbatas pada satu peristiwa dan belum mewakili pengalaman seluruh warga.

Pemerintah desa disarankan menyampaikan informasi mekanisme bantuan dengan bahasa sederhana, menjelaskan asal data dan peran masing-masing pihak, serta menyediakan saluran klarifikasi yang mudah diakses. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan, termasuk warga penerima dan bukan penerima, serta melengkapi data dengan observasi dan dokumen pendukung yang penggunaannya diizinkan.

Dokumentasi


UNDANGAN PENERIMA
BANTUAN PANGAN BERAS PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TAHUN 2026

Provinsi : JAWA BARAT Kabupaten/Kota : KAB. SUKABUMI
Kecamatan : Bantargadung Kelurahan/Desa : Bantargebang

Kab. Sukabumi, Rabu, 2 September 2026

Nomor : UND/02/09/26/091451
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth :
YUYUN
******6008910001
KP. CIPANCA
RT 3 / RW 2

Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Jam : 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat
Tempat : Kantor Desa
Keperluan : Mengambil Bantuan Pangan alokasi bulan Juli - September 2026 sejumlah 30 (tiga puluh) Kg Beras
Persyaratan : 1. Membawa undangan ini
2. Jika diambil sendiri: Membawa KTP asli/KD
3. Jika diwakilkan dalam 1 KK: membawa KTP asli/KD orang yang mewakili, asli/fotocopy KTP orang yang diwakili, dan KK
4. Jika diwakilkan diluar KK: membawa KTP asli/KD dan KK orang yang mewakili, serta asli/fotocopy KTP orang yang diwakili
5. Jika diambil oleh kuasa: membawa KTP asli/KD dan KK
6. Jika KTP atau KK hilang/rusak: agar membawa surat keterangan hilang/rusak dari aparat yang berwenang

Harap diambil tepat pada waktunya. Jika setelah 5 (lima) hari tidak diambil tanpa keterangan, akan dilakukan penggantian PBP
Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih

Hormat Kami,
Perum BULOG
bulog

No. Urut
871

320204200500871

UNDANGAN PENERIMA
BANTUAN PANGAN BERAS PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TAHUN 2026

Provinsi : JAWA BARAT Kabupaten/Kota : KAB. SUKABUMI
Kecamatan : Bantargadung Kelurahan/Desa : Bantargebang

Kab. Sukabumi, Rabu, 2 September 2026

Nomor : UND/02/09/26/091451
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth :
ZAINIYAH
******1209752002
KP. BANTARGEBANG
RT 1 / RW 1

Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Jam : 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat
Tempat : Kantor Desa
Keperluan : Mengambil Bantuan Pangan alokasi bulan Juli - September 2026 sejumlah 30 (tiga puluh) Kg Beras
Persyaratan : 1. Membawa undangan ini
2. Jika diambil sendiri: Membawa KTP asli/KD
3. Jika diwakilkan dalam 1 KK: membawa KTP asli/KD orang yang mewakili, asli/fotocopy KTP orang yang diwakili, dan KK
4. Jika diwakilkan diluar KK: membawa KTP asli/KD dan KK orang yang mewakili, serta asli/fotocopy KTP orang yang diwakili
5. Jika diambil oleh kuasa: membawa KTP asli/KD dan KK
6. Jika KTP atau KK hilang/rusak: agar membawa surat keterangan hilang/rusak dari aparat yang berwenang

Harap diambil tepat pada waktunya. Jika setelah 5 (lima) hari tidak diambil tanpa keterangan, akan dilakukan penggantian PBP
Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih

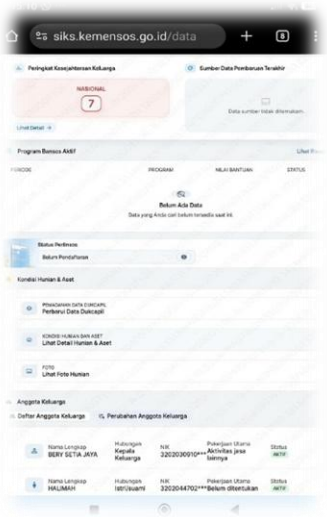
Hormat Kami,
Perum BULOG
bulog

No. Urut
872

320204200500872

.









DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., Zanynu, M. A., Simatupang, Y., Purwanti, R. E., et al. (2026). Komunikasi publik. Eureka Media Aksara.

Fikria, M., & Moefad, A. M. (2024). Analisis teori tindakan sosial Max Weber dan teori fakta sosial Emile Durkheim dalam pengenalan tradisi lokal kemasyarakatan. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, 11(1), 109–119. https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546

Gusrienti, N. (2025). Konsep transparansi dan komunikasi yang efektif dalam pencairan dana bantuan sosial ummat. Baitul Maal: Journal of Sharia Economics, 2(2), 180–191.

Lanonci, H., Van Gobe, L., & Alhadar, S. (2025). Peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. Journal of Governance and Public Administration, 2(4), 875–896. https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2806

Megawati, E., & Kurniati, I. A. (2022). Komunikasi publik: Implementasi pengawasan diseminasi informasi publik terkait Covid-19. Deepublish.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Naim, N. (2017). Dasar-dasar komunikasi. Ar-Ruzz Media.

Retpitasari, E., Salsabila, A., Faqih, M., & Prasetyo, H. B. (2024). Komunikasi publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam penyaluran program bantuan sosial pangan non tunai untuk warga. J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam, 5(1), 31–44. https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.897

Ritzer, G. (2012). Teori sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. Pustaka Pelajar.

Sa'adah, F., & Priyanti, E. (2024). Strategi komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3). https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11409

Sedarmayanti. (2018). Komunikasi pemerintahan. Refika Aditama.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Sukendro, G. G., & Aulia, S. (2025). Masa depan komunikasi publik: Peluang dan tantangan. Konferensi Nasional Komunikasi Humanis.

Yunitasari, & Anshori, M. S. (2025). Peran komunikasi pemerintah desa terhadap kelompok tani kopi dalam mendukung ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3).

Yusra, & Hanani, S. (2024). Penerapan pemikiran tindakan yang dikemukakan oleh Max Weber di SMAN 1 Canduang. An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 397–403. https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v4i2.283